

## Perkembangan Historiografi Buku Teks Sejarah Di Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi

Heru Budiono, Alfian Fahmi Awaludin  
Pendidikan Sejarah - Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[herubudiono@gmail.com](mailto:herubudiono@gmail.com), [alfianf999@gmail.com](mailto:alfianf999@gmail.com)

### ABSTRAK

Buku Teks secara umum merupakan media untuk menyampaikan materi mata pelajaran tertentu kepada peserta didik. Demikian halnya dengan buku teks pelajaran sejarah yang dijadikan suatu sumber serta media bagi guru untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu. Namun, berbeda dengan buku teks pada mata pelajaran lainnya, dalam penulisan atau historiografi buku teks pelajaran sejarah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah pada zamannya. Hal ini pernah terbukti pada masa Orde Baru, dimana buku teks pelajaran sejarah dijadikan salah satu media untuk melegitimasi kekuasaan. Akibatnya terdapat pemahaman yang salah terhadap sebuah peristiwa sejarah pada peserta didik. Materi pelajaran sejarah pada masa Orde Baru juga ciri khas yakni dominasi yang menonjol terhadap peran militer atau ABRI. Ketika momentum reformasi terjadi, terdapat pula usaha untuk memperbaharui historiografi buku teks pelajaran sejarah. Menarik untuk di analisis historiografi buku teks pelajaran sejarah baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi. Karena dengan menganalisis historiografi dalam buku teks mata pelajaran sejarah, kita dapat memahami bagaimana sistem politik mempengaruhi sistem lainnya dan bagaimana sebuah buku teks pelajaran sejarah membawa muatan politik suatu rezim penguasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis muatan makna dari sebuah teks.

### PENDAHULUAN

Buku Teks merupakan salah satu sarana dalam pembelajaran, yang dijadikan media untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Buku teks biasanya di tulis oleh guru ataupun pakar, yang di dalamnya terdapat tujuan pedagogis serta mengacu pada suatu disiplin ilmu tertentu. Demikian halnya dengan buku teks pelajaran sejarah yang dijadikan suatu sumber serta media bagi guru untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu. Namun, berbeda dengan buku teks pada mata pelajaran lainnya, dalam penulisan (historiografi) ,buku teks pelajaran sejarah kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan pada zamannya.

Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah dijadikan salah satu media untuk melegitimasi kekuasaan pada saat itu. sejarah yang dibina oleh Orde Baru adalah sejarah dirinya sendiri yang secara sengaja disakralkan supaya diterima menjadi kebenaran yang "magis" oleh khalayak banyak<sup>1</sup>. Terbukti, historiografi yang keliru pada buku teks pelajaran sejarah telah menjadi doktrin terhadap peserta didik serta menghasilkan pemahaman yang juga keliru terhadap suatu peristiwa sejarah. Historiografi pada masa Orde Baru ini, sangat kentara pada peran militer terutama ABRI, selain itu sangat anti PKI dan komunis bahkan distigma secara negatif.

Pada masa Reformasi, yang dianggap sebagai lahirnya demokrasi yang lama terbelenggu berusaha menggugat tidak saja mengenai masalah politik dan ekonomi, tetapi juga masalah pendidikan terutama historiografi pada buku teks pelajaran sejarah. Pada masa reformasi ini merupakan suatu penentu perubahan dalam historiografi buku teks pelajaran sejarah. Historiografi yang dianggap keliru segera digagas untuk di perbaharui, citra orde lama yang sempat dikaburkan segera di rekonstruksi kembali namun masalah PKI dan komunis seakan tetap menjadi ingatan mengerikan. Dari sinilah dapat kita lihat bagaimana Perubahan historiografi pada buku teks pelajaran sejarah menarik untuk di analisis lebih dalam baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi. Karena dengan menganalisis historiografi dalam buku teks mata pelajaran sejarah, kita dapat memahami bagaimana sistem politik mempengaruhi

<sup>1</sup>Analisis Mingguan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. 2007. Vol 1 No 1. Halaman:1

sistem lainnya atau sebaliknya bagaimana sistem lain berpengaruh terhadap sistem politik dan bagaimana sebuah buku teks pelajaran sejarah membawa muatan politik suatu rezim penguasa.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Historiografi dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah

Historiografi buku teks pelajaran sejarah merupakan rekonstruksi materi sejarah berbentuk uraian narasi, yang dijadikan rujukan materi dalam mengajarkan sejarah. Ketimbang sebagai sejarah penulisan sejarah, pengertian historiografi dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah ini lebih cenderung sebagai metode. Maksudnya, historiografi jenis ini merupakan langkah penelitian sejarah dengan menafsirkan, menjelaskan, dan menyajikan suatu tulisan sejarah.<sup>2</sup> Penulisan buku teks pelajaran sejarah ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Lantaran dijadikan alat pendidikan, maka ia (buku teks pelajaran sejarah) akan dipengaruhi oleh landasan ideologi pendidikan yang dianut oleh negara tersebut. Ketika landasan ideologi dijadikan dasar penulisannya, maka akan munculah interpretasi dari pihak pembuat kebijakan pendidikan, yaitu pemerintah. Dengan kata lain, historiografi buku teks pelajaran sejarah bukan saja merupakan suatu bentuk ideologisasi negara atau pemerintah, melainkan juga bersifat politik.<sup>3</sup>

Historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah ini pada dasarnya tidak hanya ada pada masa kemerdekaan, namun pada masa penjajahan juga sudah terdapat buku teks pelajaran sejarah, dengan berpegang pada kepentingan pihak kolonial pada masa itu. Namun tujuan dari historiografi buku teks pelajaran sejarah dalam pendidikan terlepas dari kepentingan legitimasi atau faktor ideologi, adalah memberikan pengetahuan terhadap peserta didik mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu, dan mentransfer nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa tersebut. Meskipun tidak pernah dipungkiri bahwa setiap penulisan sejarah sulit melepaskan diri dari faktor subjektivitas termasuk dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah. Secara teknis, objektivitas sejarah tidak mungkin tercapai, karena itu janganlah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yaitu mengharapkan sejarah yang objektif kepada sejarawan. Sejarawan bukan dewa dan bukan pula malaikat, melainkan juga sejarawan memiliki emosi. Selama penulis, termasuk sejarawan, memiliki emosi, maka subjektivitas mungkin terjadi. Jadi, soalnya ialah seberapa jauh subjektivitas yang masih dianggap pantas dan bagaimana yang dianggap tidak pantas lagi.<sup>4</sup>

Historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah tidak sekedar untuk di jadikan media dalam proses pembelajaran agar peserta didik mendapat kemudahan dalam belajar. Namun lebih dari itu historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah di gunakan untuk menanamkan nilai-nilai terhadap peserta didik dan nilai-nilai tersebut biasanya bermuatan politik sehingga suatu hal yang wajar bahwa pergantian rezim politik akan mengubah sudut pandang isi dari buku teks pelajaran sejarah, biasanya buku-buku yang sudah ada akan di revisi sesuai dengan perkembangan politik yang ada.

### 2. Peran Negara Terhadap Historiografi Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah

Perkembangan dan perubahan isi dari penulisan buku teks pelajaran sejarah pada dasarnya tidak pernah lepas dari keterlibatan negara. Hal ini dikarenakan sejarah selalu memiliki implikasi terhadap keadaan masa kini. Sejarah merupakan rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga kini yang berguna bagi pedoman kehidupan masa sekarang serta arah cita-cita masa depan.<sup>5</sup> Sejarah memperjelas masalah dan mampu memperjelas berbagai peristiwa dan maknanya secara jelas. Faktor tersebut penting bagi kekuatan dan kepaduan masyarakat yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan dan efektivitas masyarakat.<sup>6</sup> Melalui kisah sejarah, masyarakat kontemporer membangun pemahaman,

<sup>2</sup> Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 155-271

<sup>3</sup> Agus Mulyana. (2013). "Nasionalisme dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA" dalam *Jurnal Paramita*, Vol.23, No.1 [Januari]. Halaman:78

<sup>4</sup> Nugroho Notosusanto. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu. Halaman: 13.

<sup>5</sup> Helius Sjamsudin & Ismaun. 1993. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman: 5

<sup>6</sup> A.L Rowse. 2014. *Apa Guna Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu. Halaman: 186

ingatan sejarah dan jiti diri dalam konteks kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Hal ini menjadi penting, khususnya bagi generasi kekinian yang tidak mengalami langsung kejadian-kejadian sejarah.<sup>7</sup>

Dengan melihat peranan sejarah yang sangat seterategis dalam memberikan pemahaman peserta didik mengenai pengetahuan masalah, penguatan nilai-nilai budaya serta pembentukan pribadi peserta didik, bahkan dapat menjadi suatu penggerak yang mempengaruhi sikap kekinian peserta didik yang berdasarkan pada pemahaman sejarah, maka sudah menjadi suatu kewajaran bahwa negara memiliki peranan dalam historiografi buku teks pelajaran sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa, historiografi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan serta perubahan pada historiografi Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan buku teks pelajaran sejarah. Jika kita buka kembali ingatan kita pada masa lalu, dimana pada tahun 1957 diadakan seminar sejarah yang pertama di Yogyakarta, hal tersebut digagas karena ketidakpuasan terhadap buku-buku yang masih merujuk pada karya Stafel, yang lebih bersifat *Nederlandosentrisme*. Sementara yang dibutuhkan dalam pendidikan sejarah di sekolah adalah pembentukan kepribadian bangsa. Maka pendekatan sejarah yang dikehendaki adalah *Indonesiasentris*. Dalam seminar tersebut selain membahas mengenai sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, juga di perbincangkan mengenai perlunya penulisan buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Hingga pada tahun 1970 kembali diadakan seminar di Yogyakarta dan berhasil menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia sebanyak enam jilid. Yang kemudian menjadi rujukan utama untuk buku pelajaran sejarah di sekolah baik di tingkat SMP maupun SMA.

Dari uraian yang telah di sampaikan diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa, perkembangan dan perubahan Historiografi termasuk dalam penyusunan buku teks pelajaran sejarah tidak pernah lepas dari jiwa zaman bahkan kepentingan penguasa sering kali terlampir didalamnya. Namun ada yang perlu kita garis bawahi mengenai historiografi untuk kepentingan akademis dan historiografi untuk kepentingan pendidikan, yaitu pada historiografi untuk akademis di tujukan guna mencari suatu kebenaran ilmiah sementara untuk pendidikan di tujukan guna penanaman nilai-nilai, pembentukan pribadi serta pewarisan memori kolektif. Itulah sebabnya historiografi dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah selalu terikat dengan kurikulum yang di tetapkan pada masanya. Dan buku-buku tersebut selalu di perbaharui seiring dengan perubahan kurikulum, sementara wacana yang ada saat ini kurikulum berubah seiring dengan bergantinya menteri pendidikan.

Menurut Wawan Darmawan "*the history lesson text book as a historiography work for educational purpose does not ignore the historiographical rules of history science*".<sup>8</sup> Penulisan sejarah seharusnya ada kesesuaian antara sejarah akademis dengan sejarah untuk kepentingan pendidikan di dalam buku teks. Namun pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dilakukan, sebagaimana alasan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penulisan pada buku teks sejarah selalu terikat pada kurikulum yang telah memiliki patokan muatan yang seharusnya dan tidak seharusnya ada dalam buku teks pelajaran sejarah. Sementara kurikulum yang menjadi patokan penulisan buku teks merupakan produk politik pendidikan pemerintah pada masanya.<sup>9</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi tumpang tindih.

Helius Syamsuddin dalam sebuah artikelnya menulis tentang kriteria dan permasalahan penulisan buku teks sejarah. Menurut pendapatnya ada enam kriteria yang harus dipenuhi dalam penulisan buku teks sejarah, yaitu:

1. Substansi faktual yang harus dipertanggungjawabkan;
2. Penafsiran dan atau penjelasan;
3. Penyajian dan retorika yang harus sesuai dengan teori psikologi perkembangan;
4. Pengenalan konsep-konsep sejarah (Indonesia dan Umum) perlu menggunakan kriteria;
5. Buku teks pelajaran sejarah secara teknis-konseptual mengikuti GBPP (kurikulum);

<sup>7</sup>John R Gillia. 1994. *Commemorations: The Politics of National Identity*. Prince Town: Princeton University Press. halaman: 3

<sup>8</sup>Wawan Darmawan. 2010. *Historiography Analysis of History Text Book from Neerlandocentric to Scientific*" dalam *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XI, No. 2., 99-118. Halaman: 100

<sup>9</sup> Agus Mulyana. 2011. *Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Studi Kritis*. Dalam <http://berita.upi.edu/2011/07/26/historiografi-buku-teks-pelajaran-disekolah> diakses pada 13 Mei 2016. Halaman: 5

6. Kelengkapan ilustrasi, gambar, foto, peta-peta sejarah dalam *setting* dan *lay out* yang informatif dan naratif.<sup>10</sup>

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa penulisan buku pelajaran sejarah selain harus mengacu pada kurikulum yang berlaku tetap harus memperhatikan persyaratan keilmiahannya, baik aspek fakta, waktu maupun keruangan. Selain itu kemampuan seorang penulis dan penggunaan metode apa yang di gunakan dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari buku tersebut. Namun, mau dibawa kemana arah dari penulisan historiografi dalam buku pelajaran sejarah, negara memiliki kontribusi yang besar untuk menentukannya. Aspek politik tetap ada dalam buku teks pelajaran di sekolah. Sebagaimana kita lihat perubahan yang terjadi dari masa ke masa berkaitan dengan buku teks sejarah. Yang sangat kentara adalah pada masa Orde Baru ketika buku teks sejarah di tulis untuk memperkuat legitimasi, kemudian pada masa Reformasi terjadi perubahan kembali, dengan tujuan untuk membenahi kekeliruan historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah pada masa Orde Baru. Disini saya berpendapat bahwa setiap rezim memiliki tendensi dalam sejarah, tendensi tersebut tidak hanya ada pada penulisan buku teks masa orde baru, namun setelah ada perubahan dalam penulisan buku teks masa Reformasi, tendensi tersebut tetap ada. Sejarah dalam konteks pendidikan saat ini, belum bisa lepas dari kepentingan politik.

### 3. Historiografi Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah Pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah gambaran dari suatu rezim yang sukses mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Orde Baru berhasil mempertahankan bangunan politiknya dengan menopang aspek lainnya yaitu ekonomi, pertahanan dan pendidikan sehingga sebuah sistem dapat saling mendukung untuk keberlangsungan kekuasaan yang terpusat pada sang penguasa. Orde Baru berhasil menuliskan sejarahnya sendiri, menghitamkan peran Orde Lama dan memberikan stigma negatif terhadap PKI dan Komunis. Sejarah pada masa Orde Baru di tulis berdasarkan kebutuhan yang di perlukan penguasa, termasuk dalam hal pendidikan. Kurikulum di desain untuk mendukung pemerintahan yang ada, kita ingat bagaimana menteri pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1983 adalah Nugroho Notosusanto seorang sejarawan dari kalangan militer yang kemudian menggagas pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang didalam materinya sangat menonjolkan peranan militer dan kekuasaan Orde Baru. Selai PSPB, kebijakan Nugroho Notosusanto yang lain adalah P-4.

Pada masa implementasi PSPB dilema yang dihadapi oleh guru pada saat itu adalah belum tersedianya buku-buku teks yang mendukung mata pelajaran tersebut. yang pada langkah selanjutnya segera diusahakan menyusun buku teks sebagai pedoman guru mengajar. Sebagai sebuah regim militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia (sejak tahun 1945), pemerintah Orde Baru merasa berhak untuk mendapatkan "saham revolusi" itu dan ditonjolkan peranannya dalam historiografi Indonesia.<sup>11</sup> kita dapat melihat bagaimana rezim Orde Baru semakin melegitimasi kekuasaannya dalam materi-materi yang terdapat pada buku teks pelajaran sejarah. Peran Orde Baru lebih di tonjolkan pada peristiwa sejarah kontemporer contohnya adalah Hari Lahir dan Penggali Pancasila; Serangan Umum 1 Maret 1949; Gerakan 30 September 1965; Surat Perintah 11 Maret 1966; Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia pada Tahun 1976; dan sebagainya.

Hari Lahir dan Penggali Pancasila. Materi sejarah di sekolah yang menjadi perdebatan publik yang ramai ini muncul pada tahun 1980-an ketika Nugroho Notosusanto (seorang sejarawan militer yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru) menulis sebuah buku tentang *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Di dalam buku itu dinyatakan bahwa rumusan Pancasila yang otentik dan benar adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang disyahkan oleh PPKI, semacam badan legislatif pada masa awal revolusi Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinyatakan juga bahwa Ir. Soekarno bukan yang pertama dan satu-satunya tokoh yang merumuskan tentang Pancasila itu.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Helius Sjamsuddin. (2000). "Penulisan Buku Teks Sejarah: Kriteria dan Permasalahannya", dalam *Historia*, No. I. Vol. I, tahun 2000. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI

<sup>11</sup>Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Depdikbud-PN Balai Pustaka, 1984, ed. revisi, cet. kelima), dimana peranan dari kelompok militer lebih ditonjolkan.

<sup>12</sup>Andi Suwarta. Masalah Sejarah Kontemporer di Indonesia: Beberapa Isu Kontroversial. Halaman: 12-13

Keganjilan yang kedua adalah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang sangat menonjolkan peranan Letkol Soeharto yang digambarkan memiliki peranan yang sangat penting dalam peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Bahkan peranan dari Jendral Soedirman, sebagai Panglima Besar TNI, dan Letjen A.H. Nasution, sebagai Kepala MBKD (Markas Besar Komando Jawa), Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari pihak sipil, sebagai penguasa di Yogyakarta pada masa revolusi, seakan dikaburkan pada masa Orde Baru.

Selanjutnya mengenai peristiwa 30 september 1965, yang saat ini tetap menjadi trauma bahkan menjadi peristiwa yang sangat kontroversial dan belum di temukan secara jelas siapa pihak yang benar-benar terlibat dalam peristiwa ini. Pemerintah Orde Baru sendiri merasa berkepentingan dengan peristiwa G30S 1965 dan berusaha memberikan penjelasan sederhana dan tafsir tunggal bahwa peristiwa itu didalangi oleh PKI sehingga menjadi logis juga bila peristiwa itu dikenal dengan sebutan "Pemberontakan atau Pengkhianatan G30S/PKI 1965".<sup>14</sup> Jika dilihat pada kenyataan saat ini stigma tersebut sangat tidak bijak dan sangat bermuatan politik.

Rangkaian peristiwa 30 september 1965 adalah surat perintah sebelas maret 1966 yang tidak kalah kontroversialnya. Yang sampai saat ini kebenarannya belum di ungkap bahkan surat asli juga belum di temukan. Namun, yang harus kita pahami disini adalah di keluarkannya surat perintah sebelas maret tidak pernah terlepas dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya, tetap ada keterkaitan antara yang satu dan yang lainnya terlepas dari terpaksa atau tidak surat tersebut dikeluarkan. Yang jelas surat tersebut telah menghantarkan seorang Soeharto ke kursi presiden.

Integrasi Timor Timur ke Indonesia tahun 1976, juga merupakan salah satu peristiwa yang menjadi legitimasi Orde Baru pemerintahan Soeharto. Meskipun pada perkembangannya integrasi Timor Timur tahun 1976 menjadi peristiwa yang juga kontroversial setelah terlepas dari NKRI tahun 1999. Dari laporan-laporan tidak resmi dan para saksi mata tentang keadaan di Timtim, misalnya, ternyata daerah itu tetap bermasalah, bergejolak, dan terjadi aksi-aksi *klandestin* yang berkelanjutan. Sementara itu dari studi-studi yang relatif objektif tentang proses integrasi Timtim ke Indonesia nampak sekali adanya rekayasa dan ketidakwajaran. Begitulah, misalnya, peristiwa "*Deklarasi Balibo*" pada tahun 1975 dimana rakyat Timtim menyatakan kemerdekaannya dan ingin berintegrasi dengan Indonesia dipandang oleh banyak orang sebagai "*Deklarasi Bali Bo(hong)*" karena deklarasi itu nampaknya dirancang dan direkayasa oleh pihak intelejen kita di pulau Bali dan isinya dinilai penuh dengan kebohongan.<sup>15</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, ketidakmampuan TNI dalam menumpas kekuatan Fretelin di Timtim dan ketidak efektifan aparat pemerintah RI dalam mengambil hati secara bijak rakyat Timtim menunjukkan bahwa masalah Timtim akan menjadi blunder bagi Indonesia.<sup>16</sup> Jadi sudah sewajarnya pada jajak pendapat tahun 1999 Timor Timur memilih lepas dari NKRI seatu kenyataan yang sangat memilukan saat itu. Saat praktek demokrasi di tegakkan ternyata harus ada wilayah yang lepas dari NKRI.

Peristiwa-peristiwa yang menjadi contoh dalam buku teks pelajaran sejarah pada masa Orde Baru tersebut setidaknya telah cukup menjadi wacana bahwa Orde Baru telah memberikan cahaya yang terang bagi perannya sendiri selama memimpin Indonesia. buku teks pelajaran sejarah telah di warnai dengan berbagai legitimasi yang terbukti mampu memperkuat kedudukan Soeharto. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah sangat berperan dalam suatu kehidupan hingga dapat melanggengkan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan yang di tulis oleh E.H Carr bahwa masa lalu hanya dapat kita pahami dengan jelas Dari sudut pandang masa kini, dan kita dapat benar-benar memahami masa kini hanya dari sudut pandang masa lalu. Memungkinkan manusia memahami masyarakat masa lalu dan meningkatkan penguasaannya terhadap masa kini adalah fungsi ganda dari sejarah.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya* (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm.194-247.

<sup>14</sup> Lihat, misalnya, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: PT Intermedia, 1990, cet.kedua); dan Setneg, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994).

<sup>15</sup> Andi Suwirta. Masalah Sejarah Kontemporer di Indonesia: Beberapa Isu Kontroversial. Halaman: 16

<sup>16</sup> Jose Ramos Horta, *Funu: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Terjemahan (Tanpa Tempat: Solidamor, 1998).

<sup>17</sup> E.H Carr. 2014. Apa itu sejarah? Jakarta: Komunitas Bambu. Halaman:71

#### 4. Historiografi Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah Pada Masa Reformasi

Masa transisi setelah turunya Soeharto dari kursi kepresidenan disebut sebagai masa reformasi dimana demokrasi kembali ditegakkan di negeri ini. Namun masa reformasi tidak lahir dengan jalan damai, kerusuhan dan krisis mengiringi lahirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah tiga dasawarsa dikuasai secara hegemonik oleh rezim Orde Baru, yang bercita-cita menciptakan stabilitas negara dengan membatasi kebebasan rakyat dalam berbicara dan berorganisasi, namun bersifat tertutup dan koruptif, kolusif, dan nepotisme, hingga terpaan krisis ekonomi tahun 1997, diperparah dengan krisis sosial dan kritis politik, maka gerakan kaum intelektual dan mahasiswa yang menuntut Reformasi, kian mengkristal. Gerakan ini menuntut pergantian Presiden dan menginginkan adanya penataan ulang pemerintahan.<sup>18</sup>

Pada perkembangannya tidak hanya penataan ulang dalam pemerintahan yang dituntut untuk dibenahi, namun dalam bidang pendidikan juga tak luput dari gugatan. Kurikulum 1994 adalah kurikulum terakhir yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dinyatakan berlaku secara nasional dan mengakhiri dominasi Pemerintah Pusat dalam dunia pendidikan.<sup>19</sup> Lebih dari itu buku pelajaran sejarah yang sebelumnya terbit pada masa Orde Baru, telah mendapat banyak kecaman. Munculnya narasi-narasi baru tentang masa lalu, acuan sejarah juga makin beragam. Tidaklah mengherankan banyak buku sejarah terbit dengan keragaman penceritaan yang kadang-kadang saling bertolak belakang tentang suatu peristiwa di masa lalu.<sup>20</sup>

Historiografi pada buku teks pelajaran sejarah pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai muatan legitimasi rezim pada masa itu segera di revisi dan beberapa peranan tokoh yang semula di kaburkan dalam penulisannya segera di rekonstruksi kembali. Seperti peranan Soekarno, dalam perumusan Pancasila, peranan Panglima Besar Jendral Sudirman, Letjen A.H. Nasution, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali di perlihatkan sebagaimana mestinya. Lalu berkaitan dengan beberapa peristiwa seperti peristiwa 30 September 1965 meskipun pada buku pelajaran saat ini tetap ada tambahan di belakangnya yaitu PKI, namun pada buku-buku akademis telah ada beberapa wacana bahwa tidak hanya PKI yang terlibat di dalamnya. Meskipun sampai saat ini belum di tentukan secara pasti, siapa, mengapa, bagaimana keterlibatan pihak tertentu.

Sebagai salah satu konsep penting dalam sejarah Indonesia kontemporer, konsep "Reformasi" juga diideologisasikan ketengah-tengah peserta didik melalui buku teks pelajaran sejarah. Dalam buku teks sejarah, bukan saja konsep Reformasi bermakna dan diopinikan baik, sedangkan zaman pemerintahan Orde Baru (1966-1998) bersifat buruk, melainkan juga para pembacanya diarahkan untuk menyetujui sikap tim penulis yang adalah juga sikap resmi pemerintah, bahwa pemerintahan Orde Baru yang buruk itu harus dikoreksi oleh pemerintahan Reformasi (1998-sekarang).<sup>21</sup>

Inilah yang sangat menarik untuk di perhatikan, ada perubahan yang prinsipnya sangat mendasar pada buku-buku teks pelajaran yang di terbitkan pada masa Reformasi, hal menarik tersebut adalah bahwa sejarah pada masa Reformasi mendapat poin lebih di bandingkan masa sebelumnya yaitu Orde Baru. Masa Orde Baru yang dahulu di paparkan dalam buku dengan gemilang kini surut, cahayanya berpindah kepada Reformasi. Dalam buku-buku pelajaran sejarah terurai wacana bahwa masa Reformasi adalah suatu bentuk pembenaran dari masa sebelumnya. Dari sini dapat kita ambil sebuah pengertian bahwa historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan politik. Perubahan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru ke Reformasi, namun jauh sebelumnya juga telah terjadi perubahan dimana pada masa penjajahan buku-buku teks banyak memaparkan mengenai kepentingan pihak penjajah lalu pada masa Orde Lama, buku-buku tersebut di ganti dengan buku-buku yang lebih ideal dengan kepentingan negara. Lalu pada Orde Baru identik dengan

<sup>18</sup>Musthofa, Sh., Suryandari & Tutik Mulyati. (2009). *Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah 3 untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>19</sup> S. Hamid Hasan. *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*. Halaman 29

<sup>20</sup> Analisis Mingguan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. 2007. Vol 1 No 1. Halaman:4

<sup>21</sup> Mi'raj Dodi Kurniawan & Andi Suwarta. 2016. *Idiologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah*. *Mimbar Pendidikan*. Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan. Bandung: Upi Press. Halaman:67

sejarah militer dan pada masa Reformasi memunculkan demokrasi dan menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik.

## KESIMPULAN

Historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah merupakan suatu narasi yang memaparkan peristiwa sejarah yang penyusunannya di tujukan untuk keperluan pendidikan sehingga selalu terikat dengan ketentuan yang ada dalam kurikulum pada masanya. Buku teks pelajaran sejarah sering kali diboncengi dengan kepentingan politik pada masanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran sejarah adalah untuk menanamkan nilai-nilai, membentuk karakter peserta didik serta memberikan pengetahuan agar peserta didik dapat berfikir kritis. Namun pada kenyataannya nilai-nilai yang di tanamkan pada diri peserta didik selalu membawa kepentingan politik suatu rezim. Sehingga wajar jika dalam setiap pergantian rezim dan perubahan arus politik, buku-buku teks sejarah juga akan di revisi sesuai dengan tuntutan pada masa itu.

Perubahan buku teks pelajaran sejarah itu dapat kita lihat pada masa Orde Baru menuju masa Reformasi. Buku teks pelajaran sejarah pada masa Orde Baru dianggap sangat menonjolkan peranan Soeharto dan militer dalam beberapa peristiwa, contohnya adalah peristiwa serangan umum di Yogyakarta, Peranan Orde Baru di redupkan selain itu PKI dan Komunis mendapat stigma yang sangat negatif sehingga banyak orang Indonesia sangat anti bahkan hanya dengan lambang palu arit yang pernah di gunakan PKI. Indoktrinasi melalui pendidikan dengan media buku teks sejarah terbukti sangat berhasil dalam menunjang kekuatan politik dan memperkuat kedudukan Soeharto. Selanjutnya pada masa Reformasi, penulisan yang dianggap keliru pada buku teks pelajaran sejarah tersebut di revisi dan di rekonstruksi kembali, sesuai dengan kebutuhan pada masa reformasi. Ini artinya bahwa buku-buku teks sejarah akan terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan arus politik.

## DAFTAR PUSTAKA

Analisis Mingguan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. 2007. Vol 1 No 1.

Agus Mulyana. 2013. "Nasionalisme dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA" dalam *Jurnal Paramita*, Vol.23, No.1 [Januari].

Agus Mulyana. 2011. *Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Studi Kritis*. Dalam <http://berita.upi.edu/2011/07/26/historiografi-buku-teks-pelajaran-disekolah/> diakses pada 13 Mei 2016.

A.L Rowse. 2014. *Apa Guna Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu.

E.H Carr. 2014. *Apa itu sejarah?* Jakarta: Komunitas Bambu.

Helius Sjamsudin & Ismaun. 1993. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Helius Sjamsuddin. 2000. "Penulisan Buku Teks Sejarah: Kriteria dan Permasalahannya", dalam *Historia*, No. 1. Vol. I, tahun 2000. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI

Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

John R Gillia. 1994. *Commemorations: The Politics of National Identity*. Prince Town: Princeton University Press

Heru Budiono, Alfian Fahmi A.

Jose Ramos Horta, *Funu: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Terjemahan (Tanpa Tempat: Solidamor, 1998).

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Depdikbud-PN Balai Pustaka, 1984, ed.revisi, cet.kelima).

Musthofa, Sh., Suryandari & Tutik Mulyati. 2009. *Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah 3 untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Mi'raj Dodi Kurniawan & Andi Suwirta. 2016. *Idiologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah*. Mimbar Pendidikan. Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan. Bandung: Upi Press

Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. 1990. *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Terjemahan. Jakarta: PT Intermedia

Seskoed. 1989. *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.

Setneg. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* Jakarta: Sekretariat Negara RI.

S. Hamid Hasan. *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Idiologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*.

Wawan Darmawan. 2010. *Historiography Analysis of History Text Book from Neerlandocentric to Scientific* dalam *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XI, No. 2.